

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan latar belakang penelitian, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan Penegasan Istilah.

#### **A. Latar belakang**

Pendidikan memiliki peranan krusial sehingga membentuk penerus muda yang berkualitas dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Dengan pendidikan yang memadai, potensi siswa dapat terungkap dan mereka dapat berperan secara positif dalam memajukan bangsa dan negara (Sri Larasanti, 2011).

UUD Sisdiknas memberikan gambaran yang komprehensif tentang makna pendidikan di Indonesia. Pendidikan bukan hanya tentang mengejar nilai akademis, tapi juga tentang mengembangkan potensi diri secara menyeluruh dan membentuk generasi muda yang berkualitas dan bermoral (Febriyanti, 2022).

Presiden Indonesia yang ke-7, Joko Widodo, telah menginstruksikan seluruh aparat negara untuk mengintegrasikan pendidikan anti-korupsi ke dalam kurikulum pembelajaran. Instruksi tersebut tertulis dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengeluarkan surat edaran pada tahun 2012 dengan tujuan mendorong pelaksanaan pendidikan anti-korupsi (Habib, 2022).

Pada kenyataannya sekarang ini Pendidikan di Indonesia masih belum mampu membentuk karakter yang sesuai dengan identitas bangsa. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus korupsi di berbagai sektor. Korupsi telah

menjadi fenomena yang lumrah dan bahkan di beberapa kalangan sudah menjadi bagian dari budaya. Korupsi, secara sederhana, adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Tingginya angka kasus korupsi di Indonesia sehingga sehingga hal tersebut membuat negara ini menjadi salah satu negara yang paling korup di dunia (Sri Larasanti, 2011). Hal ini dapat dilihat adanya laporan yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK 2.707 Laporan dugaan korupsi pada semester 1 tahun 2023.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat lonjakan laporan dugaan korupsi pada semester pertama tahun 2023. Tercatat 2.707 laporan diterima, mencerminkan maraknya praktik korupsi di berbagai instansi pemerintahan, baik di tingkat kementerian, lembaga daerah, BUMN, maupun BUMD. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengungkapkan data tersebut dalam konferensi virtual pada Senin (14/8/2023). DKI Jakarta menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, mencapai 359 laporan, diikuti Jawa Barat (266), Jawa Timur (213), Sumatera Utara (202), dan Jawa Tengah (135). Lebih lanjut, Johanis Tanak menjelaskan bahwa dari 2.707 laporan, sebanyak 2.378 telah melalui proses klarifikasi dan verifikasi. Sebanyak 1.058 laporan di antaranya telah ditelaah, dengan 962 laporan telah diselesaikan (KPK, 2023).

Tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia menghadirkan ancaman serius terhadap masa depan negara. Untuk menghadapinya, diperlukan usaha pemberantasan yang menyeluruh melalui penegakan hukum dan pendidikan. Institusi pendidikan memiliki peranan utama dalam mencegah korupsi dengan mengajarkan nilai-nilai anti-korupsi kepada siswa dan mahasiswa sejak dini, menggunakan kurikulum yang relevan dan metode pengajaran yang menarik.

Selain itu, penting juga untuk mengembangkan karakter dan moral yang kuat, seperti rasa cinta pada tanah air dan nasionalisme, serta melibatkan peran aktif pendidik dan tenaga pengajar sebagai contoh bagi siswa. Pendidikan anti-korupsi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat, termasuk orang tua dan keluarga, untuk memberikan teladan yang baik. Dengan memperkuat peran pendidikan, kita dapat membentuk generasi muda yang terbebas dari korupsi, yang akan membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera (Rizki & Sumardjoko, 2023).

Sekolah tidak hanya dilihat sebagai institusi pendidikan yang bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga sebagai platform untuk mengimplikasikan dan menanamkan nilai-nilai moral serta karakter. Dalam konteks tantangan korupsi yang semakin memprihatinkan, peran sekolah menjadi sangat vital dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi sembilan prinsip pendidikan anti-korupsi yang dianggap penting untuk disampaikan kepada siswa, termasuk: jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana, dan mandiri (Justiana, 2014).

Prinsip-prinsip anti-korupsi menjadi pondasi penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki integritas dan ketahanan terhadap praktik korupsi. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah memiliki peranan penting dalam mengajarkan nilai-nilai tersebut melalui penyelipan dalam berbagai bidang studi, terutama dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Masa sekolah dianggap sebagai fase krusial dalam pembentukan karakter dan moralitas anak-anak, di mana mereka cenderung lebih

mudah dipengaruhi dan bidan oleh orang lai yang lebih dulu dari mereka. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus menjadi pagar yang melawan korupsi dengan memberikan siswa modal sosial yang kuat untuk menerima dan menginternalisasi perilaku anti-korupsi di lingkungan sehari-hari. Melalui nanamkan nilai-nilai anti-korupsi sejak usia dini melalui penyelipan dalam mata pelajaran PPKn, sekolah dapat aktif berperan dalam membentuk generasi muda yang bebas dari korupsi dan siap mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Nova, 2022).

Kurikulum Indonesia saat ini (2013) mewajibkan siswa untuk mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), yang mencakup elemen penting: pendidikan anti-korupsi. Meskipun belum menjadi mata pelajaran tersendiri, pengajaran tentang anti-korupsi perlu disertakan dalam kurikulum. Hal yang sama berlaku untuk pendidikan karakter. Meskipun juga bukan mata pelajaran yang berdiri sendiri, hal itu harus diselipkan ke dalam mata pelajaran lain, terutama Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama (Nova, 2022).

Walaupun pendidikan anti-korupsi belum secara resmi dimasukkan sebagai mata pelajaran independen dalam kurikulum 2013, prinsip-prinsip anti-korupsi masih dapat diperkenalkan kepada siswa melalui penyelarasan dengan mata pelajaran yang telah ada. Salah satu sarana yang cocok untuk hal ini adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang termasuk dalam mata pelajaran yang diwajibkan. PPKn memiliki konten yang sejalan dengan pendidikan anti-korupsi, seperti nilai-nilai Pancasila, pentingnya integritas, dan prinsip keadilan. Dengan menyelaraskan pendidikan anti-korupsi ke dalam kurikulum

PPKn, sekolah dapat memanfaatkan waktu pelajaran yang sudah ada untuk membentuk karakter yang bermoral bagi siswa (Nova, 2022).

Proses insersi dimulai dengan penyesuaian terhadap kurikulum yang digunakan di sekolah. Kurikulum, sebagai inti dari pembelajaran, setidaknya harus memperhatikan dua aspek utama. Pertama, pemilihan materi atau substansi pembelajaran yang sesuai. Ini mencakup relevansi dengan kebutuhan siswa, keterkaitan dengan materi yang diajarkan, serta mendorong siswa untuk belajar secara lebih mendalam secara mandiri. Kedua, manajemen kurikulum melalui penerapan metode pembelajaran yang efektif, didukung oleh sistem penilaian yang bertujuan untuk mencapai kompetensi dan kehandalan pendidikan (Widya Rahmawati Al-Nur, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Habib dkk, (2022) Menunjukkan bahwa: 1) Integrasi model nilai-nilai anti-korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMPN 8 Mataram telah berhasil dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran saintifik seperti Discovery Learning, PBL, dan PJBL. Hal ini terbukti dari proses pembelajaran yang melibatkan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang telah mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi. 2) Meskipun demikian, implementasi integrasi nilai-nilai anti-korupsi dalam pembelajaran PPKn di SMPN 8 Mataram masih belum optimal karena hanya dilaksanakan pada tahap awal dan akhir pembelajaran, tanpa melibatkan seluruh tahapan pembelajaran.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Natal Kristiono dkk, (2022) Menyebutkan setelah menerapkan pendidikan anti-korupsi, siswa dapat menyadari risiko dari tindakan korupsi, memahami nilai-nilai yang terkandung di

dalamnya, dan mengalami perubahan dalam karakter mereka. Faktor-faktor yang mendukung kesuksesan meliputi kekuatan individu, penggunaan media dan sumber belajar yang sesuai, serta pemilihan strategi yang tepat. Namun, ada faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan pendidikan anti-korupsi, seperti lingkungan sosial dan kesalahan dalam memilih media serta strategi pembelajaran

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Widya Rahmawati, (2021), menyebutkan integrasi nilai-nilai anti-korupsi melalui pengembangan Hidden Kurikulum dapat termanifestasi dalam beberapa aspek. Pertama, melalui penguatan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama dalam konteks yang positif. Kedua, dengan menerapkan model pengembangan Hidden Kurikulum seperti model grass-roots. Ketiga, dengan mendukung berbagai kegiatan yang mempromosikan sikap anti-korupsi, termasuk kegiatan yang didesain oleh pendidik seperti perlombaan kebersihan kelas, penyediaan buku pengembangan diri, dan pemberian pin anti-korupsi.

Dari hasil pembahasan diatas bahwa **penelitian Inseri nilai-nilai pendidikan anti korupsi melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam menumbuhkan karakter Siswa MTs Muhammadiyah 1 Malang** merupakan langkah strategis untuk membentuk pemahaman dan kesadaran siswa tentang pentingnya memerangi perbuatan yang koruptif dan membentuk karakter yang berkualitas. Hal ini dilakukan melalui Menyisipkan nilai anti korupsi yaitu Nilai Kejujuran, Tanggung jawab, dan Kedisiplinan.

## **B. Fokus masalah**

Penelitian ini memusatkan perhatian pada Inseri nilai anti korupsi melalui pendidikan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam menumbuhkan karakter Siswa di MTs Muhammadiyah 1 Malang serta hambatan dan solusinya, dan nilai-nilai yang akan diterapkan, seperti Kejujuran, Tanggung jawab, dan Kedisiplinan.

## **C. Rumusan masalah**

1. Bagaimana penerapan Inseri nilai-nilai pendidikan anti korupsi melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam menumbuhkan karakter Siswa MTs Muhammadiyah 1 Malang?
2. Bagaimana kendala dalam penerapan Inseri nilai-nilai pendidikan anti korupsi melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam menumbuhkan karakter Siswa MTs Muhammadiyah 1 Malang?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan pada penerapan Inseri nilai-nilai pendidikan anti korupsi melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam menumbuhkan karakter Siswa MTs Muhammadiyah 1 Malang?

## **D. Tujuan penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan penerapan Inseri nilai-nilai pendidikan anti korupsi melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam menumbuhkan karakter Siswa MTs Muhammadiyah 1 Malang.

2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam penerapan Inseri nilai-nilai pendidikan anti korupsi melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam menumbuhkan karakter Siswa MTs Muhammadiyah 1 Malang.
3. Untuk mendeskripsikan solusi yang dilakukan pada penerapan Inseri nilai-nilai pendidikan anti korupsi melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam menumbuhkan karakter Siswa MTs Muhammadiyah 1 Malang.

#### **E. Manfaat penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki dua keuntungan utama, yaitu keuntungan dalam hal teori dan keuntungan dalam hal praktis.

##### 1. Manfaat teori

Temuan dari penelitian ini berpotensi untuk menyempurnakan pemahaman akademis para pendidik tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai pendidikan anti-korupsi pada bagian tertentu dari materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Peneliti

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi berharga dalam domain pengetahuan bagi para peneliti yang tertarik untuk mempelajari bagaimana nilai-nilai anti-korupsi dapat disisipkan melalui mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya membentuk karakter siswa, serta dalam menyelesaikan proyek penelitian mereka.

###### b. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Hasil penelitian dapat digunakan menjadi referensi dan menjadi acuan untuk melakukan penelitian selanjut dalam penerapan Inseri nilai-nilai

pendidikan anti korupsi melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam menumbuhkan karakter Siswa.

c. Siswa

Diharapkan bahwa hasil penelitian akan membentuk karakter siswa tidak hanya dalam konteks kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam lingkungan sekolah, sehingga siswa, yang merupakan generasi penerus bangsa, dapat menjauhkan diri dari perilaku koruptif dan tindakan yang merugikan pihak lain atau individu lainnya.

## **F. Penegasan istilah**

### **1. Inseri**

Inseri, yang berasal dari kata bahasa Inggris "Insertion" dan berarti penyisipan, adalah strategi penting dalam memperkuat nilai karakter. Pemerintah telah mengambil langkah bijak dengan menerapkan inseri untuk menyisipkan nilai-nilai karakter ke dalam setiap mata pelajaran di sekolah dan madrasah. Inseri ini merupakan metode inovatif yang menyajikan materi pelajaran dengan cara menanamkan inti sari nilai-nilai antikorupsi dalam pelajaran PPKn, menjadikannya lebih relevan dan bermakna bagi siswa (Solong & Gorontalo, 2023).

### **2. Nilai-nilai Pendidikan Anti korupsi**

Pendidikan antikorupsi merupakan komponen integral dari pendidikan karakter yang berfokus pada pengembangan nilai-nilai mulia untuk menentang korupsi. Nilai-nilai anti-korupsi ini berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan, mengatur, dan menetapkan perilaku seseorang, menjadi standar tingkah laku yang positif dalam kehidupan bersosial. Menurut justiana dalam

(Suyitno et al., 2021), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merumuskan sembilan nilai anti-korupsi yang wajib ditanamkan dan diamalkan, antara lain: jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana, dan mandiri.

### 3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran sentral dalam membentuk karakter yang kokoh dan beretika bagi warga negara, sambil menegakkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Melalui kurikulum ini, siswa diperkenalkan dengan pengetahuan mendalam mengenai moralitas, etika, interaksi antarwarga, hak dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, serta kesadaran terhadap aspek hukum dan politik. Dengan pemahaman yang menyeluruh tentang nilai-nilai yang mendasar tersebut, diharapkan terciptanya suasana sosial yang demokratis dan berakar pada ajaran Pancasila. PKn berperan dalam menanamkan semangat patriotisme, rasa cinta terhadap tanah air, dan komitmen terhadap pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa (Nandri Sugiarti, 2018).

### 4. Karakter

Karakter merujuk pada kombinasi sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Di antara keterampilan tersebut termasuk kemauan untuk mencapai standar tertinggi, kapasitas berpikir kritis dan moralitas yang rasional, tindakan yang bersifat jujur dan bertanggung jawab, kesadaran akan prinsip-prinsip moral saat menghadapi ketidakadilan, kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi, baik secara interpersonal

maupun emosional, serta dedikasi untuk berperan aktif dalam pembangunan komunitas dan masyarakat (Zubaedi, 2011).

